

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**BAB II
ASAS, CIRI, DAN SIFAT**

Pasal 2

Asas Ormas **tidak bertentangan** dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Penjelasan Umum :

Bagi ormas yang telah mencantumkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas, maka tidak perlu mengubah kembali asasnya.

Usulan F-PAN :

Bagi Ormas yang telah mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas berarti telah sesuai dengan jiwa dan semangat dengan Pasal 2 tersebut, karena itu tidak perlu mengubah kembali asasnya.

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Catatan :

Perlu penjelasan bahwa ormas yang merupakan sayap partai politik, tunduk pada UU tentang Parpol, bukan pada UU Ormas dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB III
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Ormas memiliki bidang kegiatan:

- a. agama;
- b. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. hukum;
- d. sosial;
- e. ekonomi;
- f. kesehatan;
- g. pendidikan;
- h. sumber daya manusia;
- i. penguatan demokrasi Pancasila;
- j. pemberdayaan perempuan;
- k. lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- l. kepemudaan;
- m. olahraga;
- n. profesi;
- o. hobi;
- p. seni dan budaya; dan/atau
- q. bidang kegiatan lainnya.

Pasal 8

Ormas memiliki lingkup:

- a. nasional;
- b. provinsi; atau
- c. kabupaten/kota.

BAB IV PENDIRIAN ORMAS

Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 12

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 13

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh status badan hukum, tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan nasional;
 - b. gubernur bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan provinsi; atau
 - c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.

- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

Catatan:

Perbaiki redaksional dengan menegaskan agar camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain yang aktif melakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 20

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 21

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan

Usulan redaksi penjelasan:

Yang dimaksud dengan “secara transparan dan akuntabel” terhadap dana yang diakses Ormas dari APBN dan/atau APBD dan asing harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dana yang diterima Ormas berasal dari iuran anggota, maka harus dikelola sesuai dengan peraturan internal organisasi.

Keterangan:

Substansi ini sudah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 39.

f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

BAB VII ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 22

Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.

Pasal 23

Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

Pasal 24

Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 25

Ormas lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 26

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

Pasal 27A

Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27B

Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 28

Ormas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam AD.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.

Pasal 30

- (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam **jangka** waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 31

- (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau **mendirikan** Ormas yang sama.
- (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 33

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.
- (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.
- (3) Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB IX KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 35

- (1) Keputusan Ormas di setiap tingkatan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan AD dan/atau ART.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Ormas.

BAB X AD DAN ART ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas;
 - d. visi dan misi;
 - e. tujuan dan fungsi;
 - f. kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban anggota;
 - h. penerimaan dan pemberhentian anggota;
 - i. mekanisme pengambilan keputusan;
 - j. pengelolaan keuangan;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. mekanisme pengawasan internal; dan
 - m. pembubaran.

Bagian Kedua
Perubahan AD dan ART Ormas

Pasal 37

- (1) Perubahan AD dan ART dilakukan **melalui** forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ke kementerian, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam **jangka** waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 38

- (1) Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah;
 - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - e. hasil usaha Ormas; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum.
- (2) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b menghimpun dan mengelola dana dari anggota dan masyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
- (2) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BADAN USAHA ORMAS

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
- (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART.
- (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

Catatan:

Ditambah ayat

- (1A) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek kesejarahan, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.

- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan
 - c. kursus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerjasama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

ORMAS YANG DIDIRIKAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 44

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya; atau
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia.

Usulan :

c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

*Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf c:
Yang dimaksud dengan “badan hukum asing” adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.*

Pasal 45

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin ~~dari~~ pemerintah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin operasional.

Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan.

- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah ~~atau~~ dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
 - b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

Pasal 47

- (1) Izin operasional bagi ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya.

Alternatif ayat (2) :

- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya setelah mendapat pertimbangan dari tim perizinan.

Catatan :

*Diserahkan pada pemerintah untuk merekonstruksi kembali.
Akan diteruskan pada masa sidang selanjutnya*

- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a wajib bermitra dengan Pemerintah dan dapat bermitra dengan Ormas berbadan hukum atas izin Pemerintah.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebut berakhir.

Pasal 48

- (1) Badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan bagi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

Alternatif ayat (2) :

- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga negara asing bersama warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. warga negara asing yang mendirikan Ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. pemegang izin tinggal tetap;
- c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

Alternatif butir c :

- c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut.

(berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan)

- d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Catatan:

Perlu ada kesetaraan persyaratan mendirikan Ormas bagi badan hukum asing

USUL PEMERINTAH :

(2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**.

Alternatif rumusan:

Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan (berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan)
- c. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Usul Kemenlu :

Tim Perizinan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri, dan diatur dalam peraturan pemerintah

Alternatif :

Pembentukan tim perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan :

- *Pasal 49 dan Pasal 49A direkonstruksi ulang/ digabung.*
- *Redaksi jangan sampai menggantung.*

Pasal 50

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada pemerintah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 51

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;

Catatan :

Yang dimaksud dengan “kegiatan politik” adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, antara lain, penggalangan dana untuk jabatan politik, propaganda politik, ikut terlibat dalam demonstrasi atau ikut mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

Pasal 52

Catatan :

Dipindahkan ke Bab Sanksi Pasal 81 agar lebih utuh dalam rumpun sanksi)

Pasal 53

Digabungkan ke dalam Bab XV Pengawasan Pasal 58.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal Ormas.
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 56

Dihapus

Pasal 57

- (1) Bentuk pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi sengketa Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 61

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang negara Republik Indonesia untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut instansi lembaga pemerintahan;
 - c. menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera organisasinya;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari pemilik nama, lambang, atau bendera negara, lembaga/badan internasional.

- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. melakukan tindakan atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik; atau
- c. Dihapus

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" adalah ajaran atheisme, komunisme/Marxisme-Leninisme.

Usul Pemerintah:

(5) Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dihapus

BAB XVIII SANKSI

Pasal 62

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif terhadap Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 61.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan:

Ayat (2) mengakomodasi adanya usulan agar pemerintah tidak serta merta menjatuhkan sanksi administrasi, karena sifat sanksi dalam rangka pembinaan.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “penghentian bantuan dan/atau hibah” adalah penghentian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas bantuan dan/atau hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

Penjelasan:

Penghentian sementara kegiatan dalam ketentuan ini tidak termasuk kegiatan internal, seperti rapat internal Ormas.

- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 64

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
- a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu (secara berulang) sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Catatan :

Dipending, disesuaikan dengan Pasal 64

Pasal 66

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 65 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 67

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung;
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, Pemerintah Daerah wajib meminta persetujuan forum komunikasi pimpinan daerah.

Penjelasan:

- *Yang dimaksud dengan forum komunikasi pimpinan daerah provinsi antara lain terdiri dari gubernur, ketua DPRD provinsi, pangdam/danrem, kapolda, kajati, dan ketua Pengadilan Tinggi.*
- *Yang dimaksud dengan forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota antara lain terdiri dari bupati/walikota, ketua DPRD kabupaten/kota, dandim, kapolres, kajari, dan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 68

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 71

- (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “permohonan” tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, tetapi harus diperiksa secara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhi asas audi et alteram partem.

- (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- (6) Pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 73

- (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 74

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 75

- (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 76

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.

**** PASAL DAN AYAT DI BAWAH INI BELUM DIBAHAS TIMUS/TIMSIN ****

- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

Pasal 77

- (1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

Pasal 78

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

- (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

Disetujui Panja, 25 Februari 2013

Pasal 79

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

Pasal 80

- (1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputuskan.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

- (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

Pasal 81

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Pemindahan dari Pasal 52 dalam rangka restrukturisasi pengaturan mengenai sanksi agar lebih utuh dalam rumpun sanksi

Pasal 82

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia.

Catatan:

Pengaturan mengenai sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

- (2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disetujui Panja, 4 Maret 2013

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Disetujui Panja 10 Juli 2012, perbaikan redaksi
Disetujui Timus, 2 April 2013, diredaksikan ulang.**

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Disetujui Panja 10 Juli 2012

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disetujui Panja 10 Juli 2012

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR ...
Disetujui Panja 10 Juli 2012**

**** PASAL DAN AYAT DIBAWAH INI SUDAH DIBAHAS DI TIMUS/TIMSIN ****

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 85

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtsper-soonlijkheid van Vereenigen) sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain tetap diakui keberadaannya dan diakui kesejarahannya dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

Alternatif 1:

Pasal 85 (b)

Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtsper-soonlijkheid van Vereenigen) sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya dan tidak harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

Alternatif 2:

Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtsper-soonlijkheid van Vereenigen) sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya dan tidak harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan:

Ormas yang telah berbadan hukum dalam ketentuan ini antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarekat Islam, Taman Siswa, Al-Irsyad Islamiyah.

Catatan Timus 10 April 2013 :

Dipending dan pemerintah menyiapkan draf yang mencantumkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam batang tubuh atau dicantumkan dalam penjelasan.

Usulan F.PAN

- aa. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaannya dan dihormati nilai kesejarahannya serta tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - a. Surat keterangan terdaftar atau surat tanda pemberitahuan keberadaan organisasi yang sudah diterbitkan sebelum Undang Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.
 - b. Ormas yang telah didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing dengan warga negara Indonesia, dan badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Hasil konsultasi Tim Pemerintah:

Bahwa yang menyesuaikan adalah hanya ormas yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing dengan warga negara Indonesia, dan badan hukum asing setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.